

## Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila terhadap Kehidupan Berdemokrasi Mahasiswa

Deri Ciciria<sup>1\*</sup>, Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma<sup>2</sup>, Muhammad Hafidz<sup>3</sup>

<sup>13</sup> STKIP PGRI Bandar Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia



Cici201528@gmail.com\*

### Abstract

Higher education must become a strategic ecosystem in developing Pancasila values to regenerate student democratic life. The purpose of this study was to find out and describe the influence of understanding Pancasila values on the democratic life of STKIP PGRI Bandar Lampung students. This research involved 358 students spread across 7 (seven) study programs. This research is a quantitative descriptive study using the correlational method. The instrument of Pancasila values was adopted from the embodiment of the socialization material "Four Pillars of National and State Life", while the instrument for democratic life was adopted from the embodiment of Udin S Winataputra's opinion. Prerequisite tests and data analysis techniques in this study were carried out with the help of the SPSS version 25 application. The results showed a significant influence between the understanding of Pancasila values on the democratic life of STKIP PGRI Bandar Lampung students with a correlation value of 0.538. This research proves that college students fulfill the requirements as interest groups and legitimate democratic actors. The involvement of students in social projects and problem-solving provides more opportunities to develop students' fighting power and critical power. This will further enhance students' understanding of Pancasila values which will ultimately improve students' democratic life. The trilogy of success in learning student democratic behavior focuses on the relationship between learning in the classroom, the importance of student autonomy, and the development of democracy played by the government.

**Keywords:** Pancasila Values, Democratic Life, Pancasila Understanding

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
November 23,  
2022

Revised  
December 28,  
2022

Accepted  
December 30,  
2022

Published by  
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan karakteristik kewilayahan yang unik dan multi-kultur bukan suatu perkara yang mudah (Usman, Qodir, & Hasse, 2014). Demokrasi sebagai salah satu wujud persatuan wilayah dan keberagaman masyarakat Indonesia dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari suatu dampak positif penjajahan yang telah dirasakan berabad-abad lamanya sehingga menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan demokrasi harus diakui, diterima dan dihormati sebagai satu kesatuan yang

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v6i2.5776>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 6 Number 2, December 2022, page 154-165

utuh dan tak terpisah-pisahkan. Demokrasi mengakomodir segala perbedaan/kemajemukan yang ada untuk tetap hidup dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan yang sama serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020).

Demokrasi merupakan serangkaian tata cara/ perencanaan politik untuk mengelola kekuasaan atas kehendak rakyat (Sørensen, 1998). Konsep ini tidak melulu berkaitan dengan Pemilu ataupun penyelenggaraan pemerintahan, namun juga menggambarkan bahwa demokrasi merupakan sikap hidup yang perlu diamalkan dan diregenerasi oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila budaya demokrasi telah terbangun dengan baik, maka roda pemerintahan tentu akan mengikutinya (baik). John Dewey sebagaimana menyatakan bahwa dasar demokrasi adalah wawasan bernegara yang terwujud dalam keikutsertaan warga negara dalam mengatur kehidupan bersama (Westbrook, 2015). Demokrasi akan kokoh apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi secara aktif dalam politik. Hook menambahkan bahwa demokrasi bukan hanya semata-mata skenario untuk mendapatkan kekuasaan, namun juga mencakup partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam menentukan dan mengontrol kebijakan publik (decision making) (Hook & Shapiro, 2015). Kedua pendapat tersebut terangkum dalam pernyataan Mayo yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan persamaan dan kebebasan politik yang membuka ruang selebar-lebarnya terhadap partisipasi masyarakat terhadap pemilihan dan penentuan kebijakan umum (Mahfud, 2003).

Demokrasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia harus berdasar pada suatu pondasi dan pilar yang kokoh dan merangkul semua kepentingan semua komponen bangsa untuk mencapai perikehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pondasi tersebut adalah Pancasila yang merupakan ideologi yang dirumuskan para founding fathers bangsa dan berasal dari nilai-nilai sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Ideologi ini terdiri dari 5 (lima) sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 5 (lima) sila tersebut memiliki sifat organik, hirarkis, dan saling mengisi, sehingga membuatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan republic Indonesia yang dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi rujukan/ sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila muncul sebagai konsep dasar negara yang menyatukan segala perbedaan yang ada dan menjadi tuntunan tercapaian tujuan negara. Konseptualisasi Pancasila sebagai dasar negara bukan suatu proses yang mendadak karena kebutuhan ideologi pasca kemerdekaan, namun telah melalui serangkaian proses sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang bersumber pada nilai keagamaan, adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dan perkembangan ideologi dunia saat itu. Konseptualisasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan gagasan untuk mencari sintesis antara ideologi dan gerakan seiring proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (civic nationalism) (Marpaung, 2021).

Pancasila adalah fondasi filsafat/ pikiran yang mendalam (Filosofische Grondslag) yang dijadikan pedoman hidup (way of life) bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dasar pelaksanaan pemerintahan Indonesia (Zulfikar Putra & Wajdi, 2021). Dengan demikian, perilaku demokrasi di Indonesia pun tentu berlandaskan pada nilai-nilai

Pancasila. Pemahaman masyarakat dalam demokrasi menuntut background pemahaman individu yang baik tentang dasar-dasar kenegaraan (Ocalan, 2015). Hal ini dikarenakan demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang memiliki karakter yang berbeda dengan demokrasi di negara lainnya, perbedaan itu disebabkan kondisi kebangsaan dan karakter perjuangan bangsa yang berbeda antar bangsa/ negara satu dengan negara yang lainnya (Näsström & Kalm, 2015). Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila harus terus diregenerasi kepada seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kedaulatan rakyat.

Perguruan tinggi tidak terkecuali STKIP PGRI Bandar Lampung harus mampu menjadi sarana regenerasi demokrasi mahasiswa, terlebih mahasiswa merupakan agen perubahan sekaligus menjadi bagian dari pemilih pemula. Oleh karena itu, Perguruan tinggi harus menjadi ekosistem strategis dalam menumbuh-kembangkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini setidaknya hal ini disebabkan karena dua alasan. Pertama, berkaitan dengan lingkungan universitas. Kampus merupakan pusat pembelajaran bagi para pemimpin masa depan bangsa dan masyarakat. Banyak orang percaya bahwa mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi dapat menjadi agen perubahan yang potensial di masa depan. Di kampus, mereka tidak hanya berkesempatan belajar secara formal di dalam kelas, tetapi juga belajar secara informal melalui unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM). Organisasi kemahasiswaan, baik organisasi ekstra maupun intra kampus, merupakan wahana pembelajaran yang sangat efektif bagi mahasiswa secara informal (Kosasih, 2017; Oviyanti, 2016). Faktor kedua terkait dengan sumber daya manusia. Mahasiswa di perguruan tinggi umumnya adalah mereka yang telah diseleksi secara akademik. Mereka adalah orang-orang dengan tingkat kecerdasan tertentu, yang dianggap mampu menyerap ilmu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keadaan ini didukung dengan karakter umum mahasiswa yang biasanya progresif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (Tamtanus, 2018). Penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan di perguruan tinggi. Bukan hanya karena mahasiswa dapat menjadi katalisator penguatan ideologi negara di masyarakat, tetapi juga karena mereka adalah agen perubahan yang potensial di komunitasnya (Angkawijaya, 2017). Mereka bisa menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, birokrat, politikus, atau bahkan pemimpin negara. Jika penanaman ideologi tidak dilakukan terhadap mereka, negara akan kehilangan katalisator yang sangat potensial untuk memperkuat ideologi negara di masa depan.

Penyelenggaraan mata kuliah wajib Pancasila dan kewarganegaraan yang merupakan amanat dari undang-undang (Rindjin, 2013; Sarinah, 2017) merupakan implementasi nyata menumbuh-kembangkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi di perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila harus mampu dipahami sebagai dasar kehidupan berdemokrasi khususnya bagi mahasiswa agar mampu berpikir kritis dan bijak dalam memahami isu-isu kekinian. Dalam masyarakat yang demokratis, para warga negara adalah pembuat keputusan, oleh karena itu pemahaman nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi kacamata dalam mengembangkan, mengasah kemampuan, mengevaluasi, mengambil dan mempertahankan pendapat/ keputusan dari berbagai sudut pandang. Untuk melihat pemahaman nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa maka dapat direfleksikan melalui hasil belajar mata kuliah Pancasila.

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap hasil belajar mata kuliah Pancasila pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 di STKIP PGRI Bandar Lampung diketahui hasil ketuntasan belajar sebagai berikut:

**Tabel 1.** Ketuntasan Belajar Mata Kuliah Pancasila di STKIP PGRI Bandar Lampung

No	Program Studi	Ketuntasan Belajar (%)
1	Pendidikan Matematika	99,55%
2	Pendidikan Bahasa Inggris	98,35%
3	Pendidikan Bahasa Indonesia	98,75%
4	Pendidikan Ekonomi	98,50%
5	Pendidikan Sejarah	99,80%
6	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	97,05%
7	Bimbingan dan Konseling	98,65%

Sumber: Analisis Nilai Akhir Mata Kuliah Pancasila Tahun akademik 2021/2022

Ketuntasan belajar mata kuliah Pancasila yang diperoleh mahasiswa merupakan bukti bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terkait nilai-nilai Pancasila yang dibelajarkan dalam perkuliahan. Hal ini didukung bahwa 86,5% mahasiswa yang lulus mata kuliah memperoleh nilai unggul (A). Namun, pada saat yang sama persoalan implementasi kehidupan berdemokrasi mahasiswa mengalami banyak kendala. Hal ini tercermin setidaknya dari: pertama, penghormatan terhadap hukum dan ketertiban yang belum dilaksanakan dengan baik dilingkungan dalam maupun di luar kampus. Sebagai contoh, banyak mahasiswa yang berpakaian dan beratribut tidak sesuai aturan kampus, padahal sebagai kampus pencetak calon guru hal ini sangat menjadi perhatian. Kedua, menguatnya sikap individualisme dan perilaku hedonis mahasiswa sehingga mengesampingkan solidaritas dan penghargaan terhadap orang lain. Hal ini tampak dari munculnya kelompok-kelompok (geng) yang memilah dan memilah anggotanya berdasarkan kriteria tertentu. Dan ketiga, lemahnya budaya literasi mahasiswa yang membuat mereka gampang terprovokasi dan ikut menjadi penyebar berita bohong di media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik pada permasalahan keterkaitan pemahaman nilai-nilai nilai Pancasila terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa di STKIP PGRI Bandar Lampung. Diketuainya korelasi kedua variabel tersebut dapat memberikan gambaran kajian ilmiah yang relevan tentang outcome perkuliahan Pancasila dalam implementasi kehidupan demokrasi mahasiswa. Data ini juga sangat berguna sebagai pendukung pengembangan dan pengayoman kampus terhadap demokratisasi mahasiswa.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kuantitatif, menggunakan metode Korelasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara elektronik dengan Google Form. Instrument nilai-nilai Pancasila di adopsi dari pengejawantahan materi sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Kiemas, 2020), sedangkan Instrumen Kehidupan berdemokrasi diadopsi dari pengejawantahan Udin S Winataputra (Winataputra, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di STKIP PGRI Bandar Lampung. Adapun sampel ditetapkan dengan teknik stratified proporsional random sampling sehingga dalam penelitian ini berjumlah 358 mahasiswa yang tersebar 7 (tujuh) Program Studi. Uji prasyarat dan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbantuan aplikasi SPSS versi 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Prasyarat Analisis

Pengujian prasyarat analisis dilakukan untuk memastikan kelayakan model analisis yang digunakan. Uji yang digunakan antara lain uji normalitas, homogenitas, dan uji linieritas. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik parametrik analisis Frequency.

**Tabel 2.** Hasil Uji Normalitas

		4 PILAR	KEHIDUPAN
N	Valid	358	358
	Missing	0	0
Skewness		-,236	-,123
Std. Error of Skewness		,129	,129
Kurtosis		-,828	-,410
Std. Error of Kurtosis		,257	,257

Sumber: Output SPSS, 2022

Hasil output statistic SPSS menunjukkan bahwa nilai skweness adalah -0,236 untuk variabel pemahaman nilai-nilai Pancasila dan -0,123 untuk variabel kehidupan demokrasi mahasiswa. Kedua nilai skewness variabel tersebut berada dalam rentang -0,5 sampai 0,5, sehingga hal ini membuktikan bahwa data berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, Uji homogenitas dalam penelitian ini untuk adalah dengan menggunakan uji analisis One-Way Anova dengan melihat nilai levene statistic. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,814	10	347	,057

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengujian statistic seperti yang tertera dalam tabel 3 diketahui bahwa nilai levene statistic adalah 1,814 dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansi adalah 0,057. Oleh karena nilai probabilitas > dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian sampel adalah homogen. Terakhir, uji linearitas dalam penelitian ini dengan menggunakan analyze compare means dengan melihat nilai test of linearity. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.** Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
KEHIDUPAN *	,538	,289	,56	,318
PANCASILA			4	

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengujian statistic seperti yang tertera dalam tabel 4 diketahui bahwa besarnya nilai korelasi antara variabel pemahaman nilai-nilai Pancasila Terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung sebesar 0,538 dengan koefisien determinasi 0,289%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang linier karena mempunyai hubungan yang positif dengan skor korelasi 0,538 pada taraf nyata ( $\alpha$ ) 5%.

#### Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model bivariate correlation, karena hanya untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel saja. Adapun metode korelasi yang digunakan adalah Spearman Rho, mengingat conditional variance data yang tidak sama. Pengolahan data untuk pengujian korelasi antar variabel dengan menggunakan analisis Spearman Rho dengan Sig. (2-tailed) dapat diketahui hasil sebagai berikut:

**Tabel 5.** Correlations

		4 PILAR	KEHIDUPAN
4 PILAR	Pearson	1	,538**
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	358	358
KEHIDU PAN	Pearson	,538**	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	358	358

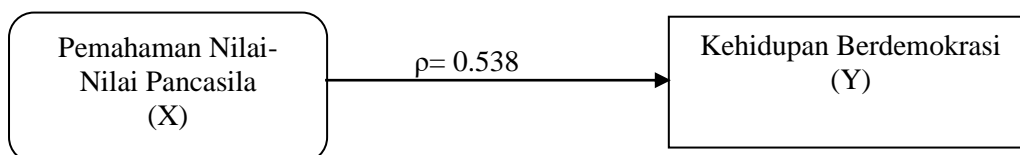
\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS, 2022

Nilai korelasi pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung adalah 0,538 dengan signifikansi atau probabilitas 0,000. Karena nilai signifikansi untuk korelasi pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung < taraf nyata 0,025 Berarti ada hubungan/ pengaruh yang signifikan antara pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung. Secara positif berarti bila pemahaman nilai-nilai Pancasila mahasiswa (X) nilainya bertambah 1 digit/ point maka kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung (Y) juga bertambah sebanyak 0,538 digit/point (53,8%), demikian pula sebaliknya.

#### Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan besar koefisien jalur pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung  $\rho = 0.538$ , dan ternyata besar koefisien jalur yang diperoleh ternyata di atas 0.05 sehingga koefisien korelasi/ pengaruh tersebut sangat berarti.



**Gambar 1.** Kerangka Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_0: \rho = 0$  atau pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak berpengaruh langsung terhadap kehidupan demokrasi mahasiswa
2.  $H_1: \rho \neq 0$  atau pemahaman nilai-nilai Pancasila berpengaruh langsung terhadap kehidupan demokrasi mahasiswa.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila berpengaruh terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung secara positif dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yang menyatakan pemahaman nilai-nilai Pancasila berpengaruh langsung terhadap kehidupan demokrasi mahasiswa dapat diterima ( $H_0$  ditolak).

## **Pembahasan**

Pemahaman mahasiswa tentang pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tergolong baik. Sebanyak 349 atau 97.5% dari 358 mahasiswa sebagai responden memiliki pemahaman, kemantapan, dan keyakinan akan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, yang dapat dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Mahasiswa juga memiliki keyakinan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai agama yang cinta damai dan rahmatan lil alamin, karena mahasiswa memahami bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai keagamaan (termasuk Islam), adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila memandang bahwa semua nilai-nilai agama mengajarkan kebaikan, sehingga dengan menjunjung tinggi dharma (kebaikan) yang nilainya hidup dan diakui oleh syariat setiap agama di Indonesia merupakan hal yang utama dalam menyatukan bangsa Indonesia. Persaudaraan sebagai dasar ikatan persatuan dan kesatuan tidak memandang sempit perbedaan agama, suku dan ras. karena pada hakikatnya setiap manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang mampu menyatukan perbedaan sekaligus mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini mahasiswa memahami bahwa Pancasila merupakan pedoman tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang muncul dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia hakikatnya telah melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan telah menjadi norma dan jiwa (*volkgeist*) dalam bersikap dan bertindak.

Sikap dan perilaku mahasiswa dalam berdemokrasi di kampus STKIP PGRI Bandar Lampung tergolong baik. 164 atau 45,8% dari 358 mahasiswa sebagai responden yang memiliki sikap dan perilaku mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan, toleransi terbuka dan kritis terhadap informasi, tanggap dan berani mengemukakan pendapat, dan menghormati kekuasaan yang sah. Kecakapan berpartisipasi demokratis merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai *agent of change*. Mahasiswa dapat belajar berinteraksi dalam kelompok, menghimpun informasi, bertukar pandangan atau merumuskan rencana tindakan sesuai dengan tingkat kematangannya. Siswa dapat belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya dengan efektif, dan menyelesaikan konflik melalui mediasi, kompromi atau membuat kesepakatan. Indikator baiknya pemahaman mahasiswa tentang kode etik kampus dapat dilihat dari kemauan mahasiswa untuk gotong royong dalam hal menjaga kebersihan kampus. Mahasiswa memiliki semangat kebersamaan yang tinggi dalam bekerja sama menjaga kebersihan kampus dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memungut sampah yang

ditemuinya di sekitaran kampus. Mahasiswa juga nampak sangat menjaga fasilitas umum yang tersedia di kampus semisal anjungan tunai mandiri (ATM), dan fasilitas kampus semisal tidak mencoret tembok kelas, bangku perkuliahan dan fasilitas kampus lainnya. Taman-taman yang berada di sekitar kampus juga tertata dengan rapi dan tidak ada unsur perusakan dari kalangan mahasiswa.

Namun ada beberapa hal yang masih terlihat lemah antara lain: ternyata ditemukan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mematuhi rambu lalu lintas. Hal ini tercermin dari kebiasaan mahasiswa yang melawan arah saat berkendara, dan parkir sembarangan, hal ini tidak saja mengancam keamanan pribadi namun juga orang lain. Dalam hal pemilihan ketua organisasi kemahasiswaan. Masih terdapat banyak mahasiswa yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan acuh tak acuh terhadap kepentingan yang tidak berpengaruh terhadapnya. Kecakapan berpartisipasi demokratis merupakan kompetensi yang lemah dikalangan mahasiswa karena mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Mahasiswa kurang dapat berinteraksi antar kelompok, menghimpun informasi, bertukar pandangan atau merumuskan rencana tindakan sesuai dengan tingkat kematangannya karena disusupi kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, mahasiswa banyak yang menggunakan berbagai sumber informasi, khususnya media sosial berbasis internet untuk mengetahui persoalan publik. Namun dalam hal ini mahasiswa cenderung tidak terlalu tertarik dengan kajian akademik/ keilmuan.

Pada indikator lain, sebagian besar mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung pada dasarnya sudah memiliki tingkat aspirasi politik yang cukup baik, artinya bahwa siswa telah mampu menyuarakan ide dan pendapatnya dalam penyelenggaraan kehidupan kampus, namun terkadang gampang terpicu pemberitaan bohong serta sering menyuarakan ide dan pendapat tanpa dasar. Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi politik dalam masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk musyawarah mufakat. Oleh karena itu, suatu aspirasi politik diperlukan suatu regenerasi berkelanjutan yang terstruktur, dan terprogram agar partisipasi warga negara dalam masyarakat yang demokratis dapat berjalan dengan baik. mahasiswa telah banyak yang menganalisis berbagai visi misi kandidat pemimpinnya yang biasanya dikumandangkan menjelang pemilihan ketua organisasi kemahasiswaan. Para siswa sebagai pemilih pemula cukup kritis dalam menjabarkan visi misi calon pemimpin mereka dengan menerapkannya ke dalam kehidupan kampus, dan yang lebih utama ternyata mereka juga menyadari hak suara yang mereka berikan akan berimbas pada kebijakan public yang nantinya akan mereka laksanakan sebagai warga kampus.

Pengembangan kehidupan berdemokrasi mahasiswa sangat penting dilakukan karena merekalah yang akan meneruskan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Studi khusus tentang keterlibatan mahasiswa biasanya berkaitan dengan aktivitas mahasiswa dalam merespon kebijakan pemerintah seperti protes dan unjuk rasa. Literatur tentang protes mahasiswa dan aktivisme politik berkembang pesat setelah ledakan protes mahasiswa di seluruh dunia maju dan berkembang pada 1960-an (Altbach, 2009; Sorey & Gregory, 2010).

Pembelajaran Pancasila yang tradisional hakikatnya telah mengisolasi daya juang dan daya kritis mahasiswa, hal ini karena pendidik tidak pernah menjadi bagian dari mahasiswa dan seolah membentuk gap. Pembelajaran tradisional yang demikian sulit untuk memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila secara nyata dan tidak menumbuhkan demokrasi di kalangan mahasiswa. Secara eksplisit pemahaman nilai terhadap ideologi negara dimulai dengan mengidentifikasi tanggung jawab siswa untuk



pembelajaran mereka sebagai kondisi kewarganegaraan demokratis, bersama dengan 'iklim kepercayaan' dan partisipasi sosialnya di masyarakat (Rowland, 2003). Pada tahapan tertentu mahasiswa dan dosen melaksanakan pembelajaran berdasarkan kesepakatan dan tidak memaksa mahasiswa melakukan sesuatu. Jika mahasiswa ingin menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, mereka juga harus menjadi peserta aktif dalam proses demokrasi di kampus. Dengan berpartisipasi dalam tata kelola pendidikan tinggi yang demokratis, mahasiswa juga mempelajari nilai umum dari berpartisipasi dalam demokrasi (Boer & Stensaker, 2007; Lizzio & Wilson, 2009). Hal ini dapat menjadi sangat penting mengingat terdapat beberapa kasus penurunan keterlibatan mahasiswa dalam politik di negara-negara demokrasi Eropa (Azmanova, 2013; Maier et al., 2018; Rodon, Osterwalder, & Favia). Karena perkembangan demokrasi perwakilan di pendidikan tinggi diuntungkan dari proses demokratisasi umum, mungkin saat ini, arah pengaruhnya bisa dibalik dan siswa yang belajar partisipasi demokratis di pendidikan tinggi bisa menguntungkan seluruh masyarakat demokratis mereka (Bergan, Gerber, Green, & Panagopoulos, 2005). Model pendidikan tinggi sebagai usaha pasar mensyaratkan definisi lain dari peran mahasiswa: mahasiswa didefinisikan sebagai klien, pelanggan, atau konsumen. Ini memberi mereka hak konsumen dalam hubungan mereka dengan institusi pendidikan tinggi (Kamvounias & Varnham, 2006). Institusi diberikan tanggung jawab untuk memastikan kepuasan mahasiswa, khususnya terkait dengan penyediaan layanan pendidikan dan dukungan, sehingga mengarah pada pengembangan mekanisme umpan balik kepuasan sebagai tempat utama keterlibatan siswa dalam proses tata kelola.

Kebebasan yang diberikan kepada siswa untuk mendiskusikan politik berdampak pada konten serta proses pengajaran. Kemampuan kritis mahasiswa memiliki peran sentral dalam mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis. Oleh karena itu, mungkin tampak bahwa jika mengajar siswa untuk menjadi kritis diperlukan untuk mempersiapkan mereka menuju masyarakat demokratis, gagasan 'kritik' mungkin merupakan tujuan pendidikan yang menghubungkan pengajaran dengan tujuan demokratisnya (Giroux, 2020; Giroux & McLaren, 1986; Kellner & Share, 2007). Pembelajaran demokrasi yang efektif tidak serta merta berkontribusi pada 'transformasi negara, demokrasi, perubahan sosial, pemberdayaan orang miskin, mengatasi masalah kemiskinan'. Namun adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dengan integrasi berbagai disiplin ilmu ke dalam dunia sosial yang lebih luas (Rowland, 2003). Gagasan dan kritik merupakan pusat pemahaman mahasiswa tentang Pembelajaran Pancasila dan Demokrasi. Kekritisan dapat membuat warga negara yang lebih baik. Pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan menjadi gagal ketika tidak menghasilkan gagasan dan kritik atau pertanyaan yang terinformasi dengan baik, dan ini akan muncul ketika mahasiswa dapat melihat melampaui batas disiplin mereka.

Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan tergantung pada konteks sosio-politik pemerintah dan Negara. Hasil dan temuan dalam penelitian ini merupakan tanggapan terhadap penelitian Rogers yang menganggap hubungan antara pengajaran dan nilai-nilai politik tidaklah penting, dengan mengklaim bahwa metode pengajaran di perguruan tinggi tidak perlu dikaitkan dengan keprihatinan seperti redistribusi kekuasaan dalam masyarakat (Entwistle & Entwistle, 1992). Logika fundamental dari model birokrasi negara adalah otoritas terpenting dalam pendidikan tinggi adalah milik negara. Dalam pendidikan tinggi, keputusan politik harus dilaksanakan untuk melayani prioritas nasional, apakah itu pembangunan bangsa atau pembangunan ekonomi. Mengikuti logika ini, mahasiswa tidak memiliki suara dalam perumusan agenda

kebijakan dan hampir tidak dalam posisi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya (Pabian & Minksová, 2011). Namun penelitian ini membuktikan bahwa mahasiswa memenuhi syarat sebagai kelompok kepentingan yang sah dalam pendidikan tinggi, dan oleh karena itu juga merupakan aktor demokrasi yang sah. Demokrasi di perguruan tinggi memberikan prinsip legitimasi dasar untuk partisipasi mahasiswa. Dalam logika ini, mahasiswa didefinisikan sebagai unsur yang sah atau bahkan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pendidikan tinggi. Sebagai pemangku kepentingan dan warga civitas akademika, mereka memiliki hak mendasar untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan tinggi di semua tingkatan dan di semua bidang pengambilan keputusan yang setara dengan warga akademik lainnya dan pemangku kepentingan eksternal. Ketika posisi mahasiswa ditentukan dengan cara ini, mereka memainkan peran sebagai kolaborator dalam mencapai tujuan yang dinegosiasikan dengan aktor lain yang diwakili dalam proses tata kelola.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan oleh peneliti serta hasil pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila dapat berpengaruh terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung secara positif dan signifikan, ini berdasarkan pada temuan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila berpengaruh terhadap kehidupan berdemokrasi mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung secara positif, erat dan signifikan. Besar koefisien jalur pengaruh  $\rho = 0.538$ , dan ternyata besar koefisien jalur yang diperoleh ternyata di atas 0.05 sehingga koefisien korelasi/pengaruh tersebut sangat berarti. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proyek sosial dan pemecahan masalah (*problem solving*) lebih memberikan kesempatan mengembangkan daya juang dan daya kritis mahasiswa. Hal ini akan semakin meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila yang pada akhirnya meningkatkan kehidupan berdemokrasi mahasiswa. Dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan harus mengurangi peran tradisionalnya di kelas, karena itu sangat tidak efektif mengembangkan kehidupan berdemokrasi mahasiswa. Ketergantungan/ sentralisasi pembelajaran pada dosen yang berlebihan dapat melemahkan tujuan kritis dari perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan. Trilogi keberhasilan pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk perilaku demokrasi mahasiswa adalah pemusatan hubungan antara pembelajaran di kelas, pentingnya otonomi peserta didik dan perkembangan demokrasi yang diperankan pemerintah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini khususnya STKIP PGRI Bandar Lampung. Kami tidak memiliki perselisihan atas manfaat dari penelitian ini.

## **PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

Kontribusi masing-masing penulis dalam artikel ini adalah sebagai berikut: DC melaksanakan pemetaan masalah, analisis data dan menyusun pembahasan hasil penelitian; TARPk berkontribusi menyusun proposal penelitian, termasuk menggali

kajian literatur terkait; dan MH berkontribusi menyebarkan kuesioner penelitian sesuai kriteria responden yang telah ditetapkan.

## REFERENSI

- Altbach, P. G. (2009). Higher education: An emerging field of research and policy. *International organizations and higher education policy: Thinking globally, acting locally*, 9-25.
- Azmanova, A. (2013). The Crisis of Europe: Democratic Deficit and Eroding Sovereignty—Not Guilty. *Law and Critique*, 24(1), 23-38.
- Bergan, D. E., Gerber, A. S., Green, D. P., & Panagopoulos, C. (2005). Grassroots mobilization and voter turnout in 2004. *Public Opinion Quarterly*, 69(5), 760-777.
- Boer, H. d., & Stensaker, B. (2007). An internal representative system: The democratic vision. In *University dynamics and European integration* (pp. 99-118): Springer.
- Entwistle, A., & Entwistle, N. (1992). Experiences of understanding in revising for degree examinations. *Learning and Instruction*, 2(1), 1-22.
- Giroux, H. (2020). *Critical pedagogy*: Springer.
- Giroux, H., & McLaren, P. (1986). Teacher education and the politics of engagement: The case for democratic schooling. *Harvard Educational Review*, 56(3), 213-239.
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*: PM Publisher.
- Hook, S., & Shapiro, E. S. (2015). *Letters of Sidney Hook: Democracy, Communism and the Cold War: Democracy, Communism and the Cold War*: Routledge.
- Kamvounias, P., & Varnham, S. (2006). Getting what they paid for: Consumer rights of students in higher education. *Griffith Law Review*, 15(2), 306-332.
- Kellner, D., & Share, J. (2007). Critical media literacy: Crucial policy choices for a twenty-first-century democracy. *Policy Futures in Education*, 5(1), 59-69.
- Kiemas, H. T. (2020). Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sumber moralitas dan hukum nasional. *BUKU DOSEN-2013*.
- Kosasih, K. (2017). Peranan Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 188-198.
- Lizzio, A., & Wilson, K. (2009). Student participation in university governance: the role conceptions and sense of efficacy of student representatives on departmental committees. *Studies in Higher Education*, 34(1), 69-84.
- Mahfud, M. (2003). Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.
- Maier, J., Faas, T., Rittberger, B., Fortin-Rittberger, J., Josifides, K. A., Banducci, S., . . . Chwedczuk-Szulc, K. (2018). This time it's different? Effects of the Eurovision Debate on young citizens and its consequence for EU democracy—evidence from a quasi-experiment in 24 countries. *Journal of European Public Policy*, 25(4), 606-629.
- Marpaung, S. F. (2021). Pendidikan Pancasila Sebagai Karakter Bangsa.
- Näsström, S., & Kalm, S. (2015). A democratic critique of precarity. *Global Discourse*, 5(4), 556-573.
- Ocalan, A. (2015). *Democratic confederalism*: Lulu Press, Inc.

- Oviyanti, F. (2016). Peran organisasi kemahasiswaan intrakampus dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal mahasiswa. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1).
- Pabian, P., & Minksová, L. (2011). Students in higher education governance in Europe: Contrasts, commonalities and controversies. *Tertiary Education and Management*, 17(3), 261-273.
- Rindjin, K. (2013). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*: Gramedia Pustaka Utama.
- Rodon, T., Osterwalder, K., & Favia, F. Reshaping European Democracy. *Fresh Agendas for a New European Commission*, 87.
- Rowland, S. (2003). Teaching for democracy in higher education. *Teaching in Higher Education*, 8(1), 89-101.
- Sarinah, M. D. (2017). *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN Di Perguruan Tinggi)*: Deepublish.
- Sørensen, G. (1998). IR theory after the Cold War. *Review of International Studies*, 24(5), 83-100.
- Sorey, K. C., & Gregory, D. (2010). Protests in the sixties. *College Student Affairs Journal*, 28(2).
- Tamtanus, A. S. (2018). Pemikiran: menetralsir radikalisme di perguruan tinggi melalui para dosen. *Untirta Civic Education Journal*, 3(2).
- Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J. (2014). Radikalisme agama di Indonesia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Westbrook, R. B. (2015). John Dewey and american democracy. In *John Dewey and American Democracy*: Cornell University Press.
- Winataputra, U. S. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Karakter berbasis Nilai dan Moral Pancasila. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn (2nd ed., pp. 1.1-1.36)*. Universitas Terbuka.
- Zulfikar Putra, S., & Wajdi, H. F. (2021). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*: Ahlimedia Book.
- 

**Copyright Holder :**

© Deri Ciciria, Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, Muhammad Hafidz, (2022).

**First Publication Right :**

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

**This article is under:**

CC BY SA